

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**KESIAPAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DI DALAM
PENERAPAN AKUNTANSI *DOUBLE ENTRY*
(*DOUBLE ENTRY BOOKKEEPING*)**



Oleh :

**YUANITA ZUBER
NIM.01043130047**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

657.6107
Zub
ke
2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA



16188
16550

SKRIPSI

**KESIAPAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DI DALAM
PENERAPAN AKUNTANSI *DOUBLE ENTRY*
(*DOUBLE ENTRY BOOKKEEPING*)**



Oleh :

**YUANITA ZUBER
NIM.01043130047**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YUANITA ZUBER
NIM : 01043130047
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : KESIAPAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI *DOUBLE
ENTRY (DOUBLE ENTRY BOOKKEEPING)*


PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING


Tanggal 16 / 2008
/02

Ketua :


Drs. Burhanuddin, MAcc, Ak

Tanggal 19 / 2008
/02

Anggota :


Sulaiman S.M, SE, MBA, Ak

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

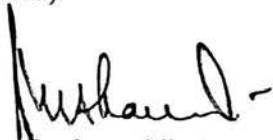
TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : YUANITA ZUBER
NIM : 01043130047
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : KESIAPAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI *DOUBLE
ENTRY (DOUBLE ENTRY BOOKKEEPING)*

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 13 Februari 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 15 Februari 2008

Ketua,



Drs. Burhanuddin, MAcc, Ak
NIP. 131801649

Anggota,



Sulaiman S.E, MBA, Ak
NIP. 132000094

Anggota,



Eka Meirawati, SE, Msi, Ak
NIP. 132149309

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak
NIP. 132000097

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”

(Qs.Al-Insyiraah : 5-8)

“Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang bangkit dan mencari keadaan yang mereka inginkan. Dan jika tidak menemukannya, mereka akan membuatnya sendiri”

(Chicken Soup for the College Soul)

“ You don't have to be the best in everything But you should make best of everything in everything you have “

(Agnes Monica)

“Tidak Ada orang yang benar-benar sempurna sehingga dapat mengerjakan segalanya dengan baik, dan Tidak Ada orang yang benar-benar serba kekurangan sehingga tidak dapat memberikan yang terbaik dari dirinya. Tapi segalanya kembali kepada kerja kerasnya masing-masing yang disertai iringan doa”

(Yuanita Zuber)

Kupersembahkan Untuk :

- ♥ *Keluarga Besarku*
- ♥ *Ibu & Ayah tercinta*
- ♥ *Adik-adikku Tersayang*
- ♥ *Sahabat-sahabatku*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini berjudul **Kesiapan Pemerintah Kota Palembang di dalam Penerapan Akuntansi *Double Entry (Double Entry Bookkeeping)***. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum Pemerintah Kota Palembang, Bab IV Analisis dan Pembahasan dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui alat bantu kuesioner yang diambil di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Data sekunder berupa dokumen akuntansi *single entry* yang digunakan dalam pencatatan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah memiliki kesiapan dalam penerapan sistem pencatatan akuntansi yang baru, yaitu Akuntansi *Double Entry*, dari segi Informasi Teknologi (IT) dan Infrastruktur. Namun, belum memiliki kesiapan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Tidak ada kendala yang terlalu berarti yang dihadapi dalam rencana penerapan sistem akuntansi *double entry* ini. Namun, sedikitnya lulusan sarjana Akuntansi yang ditempatkan di Bagian Keuangan dikhawatirkan akan menjadi penghambat dalam kelangsungan sistem pencatatan ini, karena implementasi sistem akuntansi *double entry* tergolong rumit, kompleks dan membutuhkan tenaga yang ahli di bidangnya. Pendidikan dan Latihan (diklat) serta seminar/*workshop* mengenai Akuntansi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada karyawan diharapkan dapat memberikan wacana tersendiri dalam pemahaman sistem akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai akuntansi *double entry*.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pemerintah daerah dan bahan masukan akademisi bagi penelitian Akuntansi Sektor Publik.

Penulis

Yuanita Zuber

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kesiapan Pemerintah Kota Palembang di dalam Penerapan Akuntansi *Double Entry (Double Entry Bookkeeping)*" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. *Prof. Dr. Badiah Perizade, MBA*, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. *Dr. Samsurijal, AK*, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. *Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak*, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. *Sulaiman S. Manggala, SE, MBA, Ak*, Dosen Pembimbing Akademik.
5. *Drs. Burhanuddin, MAcc, Ak*, Ketua tim pembimbing skripsi dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. *Sulaiman S. Manggala, SE, MBA, Ak*, anggota tim pembimbing skripsi.
7. *Eka Meirawati, SE, Msi, Ak*, dosen penguji skripsi.
8. Para dosen jurusan Akuntansi, para karyawan dan staff serta segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Pimpinan dan pegawai bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang, terutama : *Bapak Alm. Suharman, Kak Medice, Ibu Asni dan Mbak Yuli*. Terima kasih atas waktu dan bantuan yang diberikan. Semuanya amat bernilai bagi saya.
10. Untuk *Ibunda dan Ayahanda* tercinta.
11. Untuk Adik-adikku tersayang, *Nidya dan Balkis*.
12. Untuk teman-teman tercinta di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2004.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baik mereka dan berkah kepada kita semua, Amin....

Palembang, 15 Februari 2008

Penulis

Yuanita Zuber

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5.2. Lokasi Penelitian.....	5
1.5.3. Variabel Penelitian.....	6
1.5.4. Data dan Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.4.1 Jenis Data.....	7
1.5.4.2 Sumber Data.....	8
1.5.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.5.5. Teknik Analisis Data.....	9
1.6. Sistematika Pembahasan.....	10



BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.	Pemerintah Daerah	12
2.2.	Otonomi Daerah	15
2.3.	Keuangan Daerah	17
2.4.	Akuntansi Pemerintahan.....	19
	2.4.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	19
	2.4.2. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	20
	2.4.3. Tujuan Akuntansi Pemerintahan	20
	2.4.4. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.....	21
	2.4.5. Basis Akuntansi Sektor Publik.....	24
2.5.	Laporan Keuangan Daerah	25
2.6.	<i>Single Entry Accounting System Vs Double Entry Accounting System</i> Dalam Akuntansi Keuangan Daerah	26
2.7.	Manfaat Pelaksanaan Akuntansi <i>Double Entry</i> Bagi Pemerintah Daerah	29
2.8.	Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III	DATA DAN HASIL PENELITIAN	
3.1.	Gambaran Umum Pemerintah Kota Palembang	34
	3.1.1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palembang	34
	3.1.2. Letak Geografis	34
	3.1.3. Luas Wilayah.....	34
	3.1.4. Batas Wilayah.....	35
	3.1.5. Iklim dan Topografi	35
	3.1.6. Wilayah Administrasi.....	35
	3.1.7. Kependudukan	36
3.2.	Visi dan Misi Kota Palembang.....	36
	3.2.1. Visi Kota Palembang.....	36
	3.2.2. Misi Kota Palembang	37
3.3.	Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kota Palembang ..	38
	3.3.1. Tujuan Pembangunan Kota Palembang	38
	3.3.2. Kebijakan Pembangunan Kota Palembang	39

3.4.	Program Kerja Kota Palembang.....	41
3.5.	Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang..	42
3.6.	Gambaran Umum Bagian Keuangan Pemkot Palembang	45
	3.6.1. Struktur Bagian Keuangan Pemkot Palembang ...	46
	3.6.2. Sub Bagian Anggaran.....	48
	3.6.3. Sub Bagian Pendapatan Daerah	49
	3.6.4. Sub Bagian Perbendaharaan.....	50
	3.6.5. Sub Bagian Pembukuan.....	51
3.7	Sistem dan Prosedur Akuntansi di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang	52
	3.7.1. Sistem Akuntansi.....	52
	3.7.2. Dokumen yang dipergunakan.....	53
	3.7.3. Kondisi Pencatatan Pelaporan Keuangan.....	74
	3.7.4. Data Kepegawaian Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang	77

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.	Analisis Kesiapan Penerapan Akuntansi <i>Double Entry</i> di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang.....	83
	4.1.1. Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)	83
	4.1.2. Analisis Kesiapan Informasi dan Teknologi (IT)	95
	4.1.3. Analisis Kesiapan Infrastruktur.....	102
4.2.	Analisis Kendala Penerapan Akuntansi <i>Double Entry</i> di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang.....	110
4.3.	Keterbatasan Penelitian	113

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	116
5.2	Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	14 Kecamatan Kota Palembang	36
Tabel 3.2.	Dinas-Dinas Kota Palembang	44
Tabel 3.3.	Lembaga Teknis Kota Palembang.....	44
Tabel 3.4.	Buku Kas Umum	54
Tabel 3.5.	Buku Kas Pembantu Penerimaan	55
Tabel 3.6.	Buku Kas Pembantu Pengeluaran	56
Tabel 3.7.	Buku Kas Pembantu Khusus Penerimaan	57
Tabel 3.8.	Buku Kas Pembantu Khusus Pengeluaran	58
Tabel 3.9	Buku Bank.....	59
Tabel 3.10.	Buku Panjar	60
Tabel 3.11.	Buku Pajak	61
Tabel 3.12.	Buku Pembantu Pendapatan Per Obyek Dan Rincian Obyek	62
Tabel 3.13.	Buku Pembantu Pengeluaran Per Kegiatan.....	63
Tabel 3.14.	Buku Register Surat Keputusan Otorisasi (SKO)	64
Tabel 3.15.	Buku Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	65
Tabel 3.16.	Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM)	66
Tabel 3.17.	Buku Register Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	67
Tabel 3.18.	Buku Register Dokumen	67
Tabel 3.19.	Buku Kas Pembantu Gaji	68
Tabel 3.20.	Buku Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji	69
Tabel 3.21.	Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji	70
Tabel 3.22.	Buku Register Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Gaji	70
Tabel 3.23.	Buku Besar Penerimaan	72
Tabel 3.24.	Buku Besar Pengeluaran	73
Tabel 3.25.	Daftar Urut Kepangkatan PNS Bagian Keuangan	78
Tabel 3.26.	Tabel Inventaris Komputer Bagian Keuangan Pemkot Palembang	81
Tabel 4.1.	Latar Belakang Pendidikan Pegawai Bagian Keuangan Pemkot	84
Tabel 4.2.	Jawaban Mengenai Pendidikan Terakhir Responden.....	85
Tabel 4.3.	Pelatihan Jabatan pegawai bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang	87

Tabel 4.4.	Jawaban Responden Tentang Pendidikan dan Latihan (Diklat)/ kursus mengenai Akuntansi <i>Double Entry</i>	88
Tabel 4.5.	Seminar/ <i>Workshop</i> yang diadakan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang	91
Tabel 4.6.	Jawaban Persepsi Responden di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang Mengenai Akuntansi <i>Double Entry</i>	92
Tabel 4.7.	Spesifikasi Program dan Komputer di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang	96
Tabel 4.8.	Spesifikasi Komputer untuk Penerapan Aplikasi Simda 2.1	98
Tabel 4.9	Jawaban Responden Mengenai Kesiapan Informasi dan Teknologi (IT) di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang di dalam Penerapan Akuntansi <i>Double Entry</i>	98
Tabel 4.10	Inventaris Komputer di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang	103
Tabel 4.11	Jawaban Responden Mengenai Kesiapan Infrastruktur di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi <i>Double Entry</i>	107
Tabel 4.12	Jawaban Responden Mengenai Kendala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang di dalam Penerapan Akuntansi <i>Double Entry</i>	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang	47
-----------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Kuesioner Kesiapan dan Kendala Penerapan Akuntansi Double Entry.*

Palembang Municipality Preparation of Double Entry Accounting System Implementation

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) to examine Palembang municipality preparation of implementing double entry accounting system, and (2) to examine its obstructions in implementing this new model of accounting system.

Research finding has shown that Palembang municipality is still using single entry accounting system in its financial statement recording though the beginning of governmental rules for double entry accounting system implementation has been declared since 2002 by an internal affairs minister statement number 29. This research observes various preparations of Palembang municipality efforts to obey government rules, such its human resources, information and technology (IT) and infrastructure. In fact, the preparation shows for only its IT and Infrastructure, but not for human resources. The lack of human resources preparation is caused by a small number of employees from accounting educational background and also employee's educational and training professional to increase their quality of working. The obstruction of double entry accounting system preparation implementation is determined by employees educational background itself.

In order to overcome this lack of preparation is by improving the amount of seminar or workshop held, either internally or externally, especially more about the double entry accounting system and procedure in regional government.

Keyword : preparation, accounting, double entry

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN BAB I


**NAMA : YUANITA ZUBER
NIM : 01043130047
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : KESIAPAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI *DOUBLE
ENTRY (DOUBLE ENTRY BOOKKEEPING)***

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 3 / 08
/ 01

Ketua : 
Drs. Burhanuddin, MAcc, Ak

Tanggal 6 / 07
/ 11

Anggota : 
Sulaiman S.M, SE, MBA, Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan otonomi daerah yang memberikan peluang lebih luas kepada daerah untuk mengelola keuangannya, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan pengembangan inovasi untuk membangun efektifitas dalam akuntabilitas untuk mencapai efisiensi pada pelayanan masyarakat. Konsep akuntabilitas publik memperlihatkan bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan perhimpunan/penggalian sumber-sumber dana publik dan tujuan penggunaan dana tersebut (Partono, 2000). Konsep ini akan membawa konsekuensi pada transparansi proses pemerintahan, sehingga akan terjadi proses pengawasan secara langsung oleh rakyat pada pemerintahan maupun pada kinerja wakil rakyat yang dipilih.

Terciptanya kontrol yang kuat oleh lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif akan membuat aparat pemerintah berjalan pada jalur yang dikehendaki oleh rakyat, dan bertindak dengan satu tujuan untuk kepentingan rakyat serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya pada rakyat. Jika optimalisasi pengawasan terhadap penyalahgunaan uang negara terus ditingkatkan, maka pemerintah daerah mempunyai kesempatan lebih luas untuk melayani masyarakat dengan semangat keterbukaan, disiplin dan transparan.

Korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat serius di dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah di Indonesia, namun selama ini permasalahan itu lebih banyak disoroti dari aspek moralnya saja. Tidak banyak

pihak yang menyadari bahwa kebocoran (korupsi) adalah sebuah persoalan kegagalan administrasi, berkaitan dengan metode pengelolaan, metode pembukuan dan metode keuangan itu sendiri (Baswir,1999).

Seperti tersebut di atas bahwa salah satu penyebab masalah kebocoran (korupsi) adalah kegagalan metode pengakulasian. Selama ini, pelaksanaan akuntansi pemerintahan di Indonesia masih menggunakan akuntansi dengan dasar tata buku tunggal (*Single Entry Accounting System*) yang merupakan warisan Belanda. Penggunaan Akuntansi *single entry* (tanpa adanya penyempurnaan yang mendasar) banyak mengandung kelemahan, yaitu :

(Sugianto,dkk,1995:158-159)

1. Perencanaan akuntansi (dan anggaran) dilakukan secara terpisah sehingga berdampak pelaporannya tidak bersesuaian dengan yang lain.
2. Pengelompokan perkiraan tidak dirancang untuk menganalisis efektivitas pembiayaan suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian pengeluaran suatu proyek.
3. Pada akuntansi aset tetap tidak dibedakan belanja modal dan operasional.
4. Adanya sistem pelaporan yang dikembangkan untuk kebutuhan intern masing-masing unit organisasi pemerintah.
5. Khusus dalam pengelolaan keuangan negara, keterbatasan-keterbatasan tersebut berakibat pada ketidakmampuan akuntansi pemerintahan yang ada untuk memberikan informasi yang sesuai dengan peningkatannya dan kompleksitas transaksi keuangan negara. Akuntansi pemerintahan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi dan untuk tujuan manajerial

seperti perencanaan, penilaian kinerja, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Lebih memprihatinkan lagi adalah dampak kelemahan metode ini terhadap penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Sifatnya yang tidak lebih sebagai sekedar catatan keluar-masuk bendaharawan, menyebabkan diperlukannya suatu prosedur tersendiri dalam penyusunan PAN. Sehingga dalam praktiknya, PAN baru dapat diselesaikan sekitar 2 tahun setelah berakhirnya tahun anggaran (Ihyaul Ulum:2002).

Menyadari persoalan sebagaimana di atas, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengharuskan penggunaan akuntansi *double entry* dalam pengelolaan keuangan daerah dengan dasar pencatatan kas modifikasian (*modified cash basis*) yang mengarah pada basis akrual. Konsekuensi dari penggunaan sistem ini, pemerintah harus menghasilkan *output* berupa laporan keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Namun pada kenyataannya, sejak Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 mulai diberlakukan, sistem pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia belum terlaksana, terutama di Kota Palembang. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang melatarinya, seperti kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi dan Infrastruktur.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan diterapkannya akuntansi *double entry* pada pencatatan akuntansi daerah di bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang dengan judul :”Kesiapan Pemerintah Kota Palembang di dalam Penerapan Akuntansi *Double Entry (Double Entry Bookkeeping)*”.

1.2. Perumusan Masalah

Sistem akuntansi pemerintahan jauh berbeda dengan sistem akuntansi komersial. Perbedaan ini dikarenakan sistem akuntansi pemerintahan selalu dibatasi dengan hukum (Undang-Undang) yang berlaku. Saat ini, bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang belum sama sekali menerapkan sistem akuntansi *double entry*. Untuk itu permasalahan yang timbul adalah :

1. Apakah bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang telah memiliki kesiapan di dalam penerapan akuntansi *double entry* ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan akuntansi *double entry* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji kesiapan yang ditempuh oleh bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang di dalam penerapan akuntansi *double entry*.
- b. Untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan akuntansi *double entry*.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kesiapan bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan sistem pencatatan akuntansi *double entry*.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan mengenai konsep akuntansi *double entry* yang diterapkan di pemerintah daerah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam analisis permasalahan dapat terarah dengan baik, maka pembahasan hanya dibatasi terhadap kesiapan penerapan akuntansi *double entry* di bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang antara lain, meliputi : kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi Teknologi (IT) dan Infrastruktur.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang yang beralamat di Jl Merdeka No.1 Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.5.3. Variabel Penelitian

Menurut Sri Sularso (2003:17), variabel adalah sesuatu yang memiliki variasi nilai atau komponen utama dalam masalah, kerangka teoritis dan hipotesis.

Variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Kesiapan

Merupakan kelengkapan dan kesediaan untuk sesuatu dan perbuatan.

(Muh.Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, hal.127)

b. Akuntansi

Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi pihak-pihak yang memerlukan. (Abdul Halim,2002 :28)

c. *Double Entry*

Sistem pengklasifikasian dan pencatatan akuntansi di mana setiap transaksi dianalisis dan selanjutnya dicatat pada dua sisi yaitu sisi sebelah Kiri (Debet) dan sisi sebelah Kanan (Kredit). Persamaan akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi sistem berpasangan (*double entry*). Setiap transaksi sesuai dengan prinsip berpasangan dicatat dalam dua jalur akun yang terkait sehingga hasil persamaan akuntansi selalu menunjukkan keseimbangan $Harta = Utang + Modal$ (Modul Sistem Akuntansi Keuangan Daerah BPKP:2002).

1.5.4. Data dan Metode Pengumpulan Data

1.5.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999:146), Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang diambil di bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999:147). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa dokumen akuntansi *single entry* yang dipergunakan oleh Sub Bagian Pembukuan di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang dalam pencatatan pelaporan keuangan.

1.5.4.2 Sumber Data

Kedua jenis data di atas dikumpulkan dari dua sumber, yaitu :

a. Penelitian Lapangan

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang memerlukan kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Kepustakaan

Penelitian dengan cara mencari sumber bahan bacaan yang berupa artikel, buku-buku dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori.

1.5.4.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung analisis penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Tindakan atau langkah yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tentang informasi yang dibutuhkan untuk membantu dalam melakukan analisis dan pembahasan berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Wawancara langsung

Wawancara langsung ini dilakukan melalui tanya jawab dengan staf bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti.

b. Wawancara tidak langsung

Wawancara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan alat bantu kuesioner yang diberikan kepada pihak yang terkait dan berkompeten untuk mengisi atau menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen di Sub Bagian Pembukuan yang digunakan sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok bahasan. Data yang diperoleh berupa dokumen akuntansi *single entry* yang selama ini digunakan dalam pencatatan pelaporan keuangan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Untuk dapat menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, maka diperlukan adanya suatu analisis dalam penelitian ini. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Tahapan-tahapan yang dilakukan, meliputi :

- a. Mengelompokkan jawaban atas daftar pertanyaan yang diisi responden yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan variabel yang diukur. Skala yang digunakan untuk mengukur jawaban adalah skala dengan persentase. Masing-masing jawaban memiliki persentase yang berbeda-beda.
- b. Membuat tabulasi dalam bentuk angka untuk melihat secara keseluruhan rata-rata dari jawaban responden berdasarkan pilihan jawabannya.

Setelah angka persentase ditampilkan dalam bentuk tabulasi, maka dilakukan analisis secara kualitatif untuk :

1. Menilai kesiapan bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang dalam penerapan akuntansi *double entry*, yang dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi Teknologi (IT) dan Infrastruktur.
2. Mengidentifikasi kendala bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang dalam kesiapan pelaksanaan perubahan sistem pencatatan yang baru.

1.6. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah agar dapat memberikan gambaran secara garis besar. Skripsi ini akan ditulis dalam lima Bab dan masing-masing Bab terbagi dalam beberapa Sub Bab.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi Landasan teori yang terdiri dari pengertian Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Daerah, *Single Entry Accounting System Vs Double Entry Accounting System* dalam Akuntansi Keuangan Daerah, Manfaat Pelaksanaan Akuntansi *Double Entry* bagi Pemerintah Daerah dan penelitian terdahulu,

Bab III : Data dan Hasil Penelitian

Bab ini memuat tentang gambaran umum pemerintah Kota Palembang, struktur organisasi bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang serta data dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan akuntansi *single entry*.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan analisis kesiapan bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang di dalam penerapan akuntansi *double entry* yang diolah dari data jawaban responden terhadap kuesioner. Melalui kuesioner ini akan dapat dinilai apakah bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang telah memiliki kesiapan atau belum dalam melaksanakan sistem pencatatan akuntansi yang baru, yaitu akuntansi *double entry* dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem tersebut.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan dan saran-saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN BAB II

**NAMA : YUANITA ZUBER
NIM : 01043130047
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : KESIAPAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DI DALAM PENERAPAN AKUNTANSI *DOUBLE
ENTRY (DOUBLE ENTRY BOOKKEEPING)***

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 28 / 08
/ 01

Ketua :



Drs. Burhanuddin, MAcc, Ak

Tanggal 15 / 07
/ 11

Anggota :



Sulaiman S.M, SE, MBA, Ak

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: Depdagri.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. 2004. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. 2004. Sistem dan Prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta.
- Amri, Ali Latif. 2007. *Hubungan Latar Belakang Pendidikan, Usia Dan Masa Jabatan Dengan Keberhasilan Melaksanakan Tugasnya*. E-Learning BPPLSP Regional V. Diambil pada tanggal 27 Januari 2008 dari <http://elearn.bpplsp-reg5.go.id/cetak.php?id=18>
- Baswir, Revisond. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Bastian Indra, Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2002. *Modul Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tentang Dasar-Dasar Akuntansi I*. Jakarta: BPKP
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2002. *Modul Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tentang Pelatihan Siklus Akuntansi 5*. Jakarta: BPKP
- Gade, Muhammad. 1998. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

- Horngren, dkk. 1997. *Akuntansi di Indonesia*. Buku Satu. Jakarta :Salemba Empat.
- Hidayat,Syarif. 2003. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Diambil pada tanggal 20 November 2007 dari <http://www.skripsi-tesis.com/restrukturisasi-kelembagaan-pemerintahan-kota-yogyakarta-pasca-otonomi-daerah-menurut-peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2003/>
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Juanda, Ahmad. 2001. *Akuntabilitas dan Pengendalian Keuangan Pemerintah Daerah*, Makalah pada Seminar Pengawasan Keuangan Daerah di Fakultas Ekonomi UMM tanggal 29 April 2001.
- Khaira,Indra. *Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SIMDA Ver 2.1*. Diambil pada tanggal 21 November 2007 dari <http://www.indonesia.com>.
- Khuril Hidayati,Iffa.2002. *Evaluasi Penerapan Double Entry Accounting System pada pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Lumajang*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah,Malang.
- Kusdijono.2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta : PT.Mudaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurtain. 1989. *Pengajaran Teori dan Praktek*, Jakarta: Proyek PLPTK, Dirjen Dikti
- Partono. 2000. *Pelaporan Keuangan Umum Pemerintahan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah 14 Pebruari. Jakarta.Republik Indonesia.
- _____. 2001. *Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah di Kota Palembang*.
- Rahmanty, Yessy. 2006. *Kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditinjau dari Sumber Daya Mamusiannya*. Skripsi,Universitas Sriwijaya.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.

- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju
- Sugijanto, Robert Gunardi, Sonny Loho.1995. *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Nirlaba*. Malang :PPA FE Unibraw.
- Sularso,Sri. 2003. *Metode Penelitian Akuntansi : Sebuah Pendekatan Replikasi*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Sutanto, Himawan. 2003. *Prasyarat Calon Pemimpin*. Diambil pada tanggal 15 Desember 2007 dari <http://www.indonesia.com/sripo/2003/05/26/2605op1.htm>.
- Ulum, Ihyaul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: CV. Cahaya Press.
- Utari,Eka. 2006. *Kesiapan Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005*. Skripsi,Universitas Sriwijaya.
- Tim Aplikasi Simda. 2007. *Program Aplikasi Komputer SIMDA Versi 2.1*. Diambil pada tanggal 21 November 2007 dari <http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=19&idpage=846>
- Widjaya.1988. *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali